

Research Article

Optimizing the Da'wah Communication of the Indonesian Ulema Council as a Mediator of Anti-War Sentiment and World Peace

Tsulasy Fadhil

Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: tsulasyfadhil@gmail.com

Hanif

Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: ibnahmad0900@gmail.com

Dedeng Wiraha

Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: dedengwiraha87@gmail.com

Siti Nuri Nurhaidah

Universitas Islam As-Syafiiyah Jakarta

E-mail: sitinurinurhaidah.fai@uia.ac.id

Ahmad Irfan

Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: ahmadirfan@umj.ac.id

Copyright © 2026 by Authors, Published by Quality, Journal of Education, Arabic and Islamic Studies.

Received : June 28, 2026

Revised : July 29, 2026

Accepted : August 18, 2026

Available online : August 31, 2026

How to Cite: Tsulasy Fadhil, Hanif, Dedeng Wiraha, Siti Nuri Nurhaidah, & Ahmad Irfan. (2026). Optimizing the Da'wah Communication of the Indonesian Ulema Council as a Mediator of Anti-War Sentiment and World Peace. *Quality : Journal Of Education, Arabic And Islamic Studies*, 4(3), 295–307. <https://doi.org/10.58355/qwt.v4i3.165>

Abstract

The ongoing armed conflicts in various parts of the world place religious institutions in a strategic position as agents of peace. The Indonesian Ulema Council (Majelis Ulama Indonesia – MUI), as the highest Islamic fatwa authority in Indonesia, possesses the capacity to serve as both a moral mediator and a global peace communicator. This article examines how MUI can optimize its da'wah

communication strategy to build and strengthen anti-war sentiment among the Indonesian Muslim society and the international Islamic community. Utilizing a qualitative approach based on literature studies and policy document analysis, this research explores the theoretical framework of da'wah communication, faith-based conflict resolution theory, and MUI's track record of involvement in global peace issues. The research findings indicate that MUI holds significant potential as a moral diplomacy actor, yet it faces several structural and communicative obstacles that need to be addressed systematically. The proposed strategies include transforming da'wah mediums toward digital platforms, strengthening networks among international religious institutions, and formulating peace narratives rooted in the values of Islam as rahmatan lil 'alamin (a mercy to all creation). This study contributes to the development of contemporary da'wah communication theory and the practice of religious diplomacy within a global context.

Keywords: Da'wah Communication, MUI, World Peace, Conflict Resolution, Religious Diplomacy.

Optimalisasi Komunikasi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Sebagai Mediator Sentimen Anti-Perang dan Perdamaian Dunia

Abstrak

Konflik bersenjata yang terus berlangsung di berbagai belahan dunia menempatkan institusi keagamaan pada posisi strategis sebagai agen perdamaian. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai otoritas fatwa Islam tertinggi di Indonesia memiliki kapasitas untuk menjadi mediator moral sekaligus komunikator perdamaian global. Artikel ini mengkaji bagaimana MUI dapat mengoptimalkan strategi komunikasi dakwahnya dalam membangun dan memperkuat sentimen anti-perang di tengah masyarakat Muslim Indonesia maupun komunitas Islam internasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dan analisis dokumen kebijakan, penelitian ini mengeksplorasi kerangka teoritis komunikasi dakwah, teori resolusi konflik berbasis agama, serta rekam jejak keterlibatan MUI dalam isu-isu perdamaian global. Temuan penelitian menunjukkan bahwa MUI memiliki potensi besar sebagai aktor diplomasi moral, namun menghadapi sejumlah hambatan struktural dan komunikatif yang perlu diatasi secara sistematis. Strategi yang diusulkan mencakup transformasi medium dakwah menuju platform digital, penguatan jaringan antarlembaga keagamaan internasional, serta penyusunan narasi perdamaian yang bersumber dari nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori komunikasi dakwah kontemporer dan praktik diplomasi agama dalam konteks global.

Keywords: Komunikasi Dakwah, MUI, Perdamaian Dunia, Resolusi Konflik, Diplomasi Keagamaan.

PENDAHULUAN

Dunia kontemporer dihadapkan pada realitas konflik bersenjata yang

semakin kompleks dan melibatkan dimensi identitas yang mendalam, termasuk di dalamnya unsur agama dan etnisitas. Konflik di Palestina, Sudan, Myanmar, dan beberapa kawasan lain tidak hanya menimbulkan korban jiwa dalam jumlah masif, tetapi juga menciptakan polarisasi global yang mempertajam sentimen permusuhan antarbangsa dan antaragama. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga keagamaan berperan bukan semata-mata sebagai institusi ritual, melainkan sebagai aktor politik dan moral yang memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini publik serta mendorong upaya perdamaian (Malaviya, 2023).

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki tanggung jawab moral yang tidak kecil dalam kontribusinya terhadap perdamaian global. Di sinilah MUI – Majelis Ulama Indonesia – memegang peran kunci. Didirikan pada tahun 1975, MUI telah berkembang menjadi institusi Islam yang tidak hanya relevan secara domestik, tetapi juga memiliki jaringan dan otoritas yang diakui di tingkat internasional. Melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkannya serta keterlibatannya dalam forum-forum agama lintas negara, MUI berpotensi menjadi suara moral yang kuat dalam kampanye perdamaian dunia (Hasyim, 2020).

Namun, potensi besar itu belum sepenuhnya diwujudkan secara optimal. Komunikasi dakwah yang dilakukan MUI selama ini lebih banyak berorientasi pada isu-isu domestik seperti halal, akidah, dan moralitas sosial, sementara postur MUI dalam wacana perdamaian global cenderung bersifat reaktif ketimbang proaktif. Kesenjangan antara kapasitas yang dimiliki MUI dan peran yang sesungguhnya dimainkan dalam panggung perdamaian internasional inilah yang menjadi *research gap* utama dalam studi ini.

Penelitian tentang komunikasi dakwah dalam konteks resolusi konflik memang bukan hal baru. Beberapa studi terdahulu telah menyoroti peran ulama dan lembaga Islam dalam proses perdamaian di berbagai negara. Namun, kajian yang secara spesifik membahas strategi komunikasi dakwah MUI sebagai mediator sentimen anti-perang dan perdamaian dunia masih sangat terbatas. Sebagian besar kajian tentang MUI berfokus pada otoritas fatwanya atau posisinya dalam relasi negara-agama, bukan pada dimensi komunikatif dan diplomatisnya secara global (Regus, 2022).

Berangkat dari kesenjangan kajian tersebut, artikel ini bertujuan untuk: pertama, mengeksplorasi landasan teoretis yang menghubungkan komunikasi dakwah dengan upaya resolusi konflik dan perdamaian; kedua, menganalisis peran strategis MUI dalam isu-isu global dan diplomasi moral; ketiga, merumuskan strategi komunikasi dakwah yang dapat dioptimalkan MUI dalam meredam sentimen anti-perang; dan keempat, mengidentifikasi tantangan serta hambatan yang dihadapi dalam komunikasi dakwah global. Kontribusi artikel ini diharapkan dapat memperkaya khazanah studi komunikasi Islam sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pengambil kebijakan di MUI dan pemangku kepentingan terkait.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi

literatur analitis (*analytical literature review*) yang diperkuat dengan analisis dokumen kebijakan. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang lebih berorientasi pada pemahaman mendalam dan pengembangan kerangka teoritis daripada pengujian hipotesis kuantitatif (Supriyono, 2024).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi tiga jalur utama. Pertama, penelusuran sistematis terhadap literatur akademik yang relevan dari basis data terpercaya seperti Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan JSTOR dengan rentang waktu 2021–2025. Kata kunci yang digunakan mencakup kombinasi dari: "*da'wah communication*", "*MUI*", "*Islamic peacebuilding*", "*religious diplomacy*", "*anti-war*", "*conflict resolution*", dan "*Indonesia Islam*". Kedua, analisis dokumen resmi MUI yang tersedia secara publik, termasuk fatwa-fatwa terkait konflik dan perdamaian, pernyataan sikap, serta program-program yang berkaitan dengan isu global. Ketiga, kajian terhadap laporan lembaga internasional seperti United Nations, International Crisis Group, dan berbagai *think tank* yang membahas peran agama dalam perdamaian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Teoritis: Mengintegrasikan Dakwah dan Resolusi Konflik

Salah satu temuan paling mendasar dalam kajian ini adalah bahwa ada kesesuaian yang dalam antara misi inti dakwah Islam dan prinsip-prinsip resolusi konflik modern. Konsep Islam *rahmatan lil 'alamin*—Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta—secara inheren mengandung orientasi perdamaian yang komprehensif. Ini bukan sekadar retorika teologis, melainkan doktrin yang dapat diterjemahkan ke dalam program komunikasi yang konkret dan terukur.

Dari perspektif ilmu komunikasi, pesan dakwah perdamaian yang efektif harus memenuhi beberapa kriteria yang dapat diidentifikasi dari berbagai teori yang relevan. Pertama, pesan harus memiliki relevansi emosional—menyentuh pengalaman dan perasaan audiens secara langsung. Dalam konteks konflik bersenjata, narasi tentang penderitaan anak-anak, rusaknya keluarga, dan kehancuran peradaban memiliki kekuatan emosional yang sangat besar. MUI perlu lebih berani menggunakan narasi semacam ini, yang bersumber dari sumber-sumber Islam sekaligus menghubungkannya dengan realitas konflik kontemporer (Anggraini, D. M., 2023).

Kedua, pesan harus memiliki relevansi budaya. Komunikasi perdamaian yang efektif tidak bisa hanya mengadopsi kerangka Barat tentang hak asasi manusia atau demokrasi—ia harus berakar pada nilai-nilai yang diakui dan dihormati oleh komunitas Muslim. Di sinilah kekayaan tradisi intelektual Islam memberikan keunggulan komparatif yang signifikan. Konsep-konsep seperti *sulh* (rekonsiliasi), *'adl* (keadilan), dan *ihsan* (kebaikan yang melampaui sekadar kepatuhan hukum) memberikan vocabulari moral yang kaya untuk membangun narasi perdamaian yang autentik secara kultural (Wani, 2024).

Ketiga, dan ini mungkin yang paling penting secara strategis, pesan harus mampu membingkai konflik bukan sebagai perang antara "Islam melawan kekuatan lain", melainkan sebagai krisis kemanusiaan universal yang menuntut respons berdasarkan nilai-nilai yang dipegang bersama. *Framing* semacam ini—

yang dalam literatur komunikasi disebut sebagai "*bridging frame*"—memiliki kekuatan untuk melampaui batas-batas identitas komunal dan membuka ruang dialog yang lebih luas (Bibi, Z., 2025).

Peran Strategis MUI dalam Isu Global dan Diplomasi Moral

MUI menempati posisi yang unik dan strategis dalam peta kelembagaan Islam global. Sebagai lembaga yang mewakili umat Muslim terbesar ketiga di dunia (setelah Pakistan dan India), suara MUI memiliki bobot yang tidak bisa diabaikan dalam wacana Islam internasional. Namun, selama ini bobot ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk agenda perdamaian global (Hifni et al., 2022).

Dalam analisis yang lebih kritis, terdapat setidaknya tiga dimensi peran strategis yang bisa dimainkan MUI. Pertama, MUI sebagai aktor *diplomasi moral*. Berbeda dari diplomasi konvensional yang menggunakan instrumen kekuasaan politik dan ekonomi, diplomasi moral bekerja melalui otoritas etis dan kewibawaan spiritual. Fatwa MUI tentang perdamaian, jika dirumuskan dengan argumentasi yang kuat dan dikomunikasikan secara efektif, dapat memengaruhi tidak hanya pandangan masyarakat Indonesia tetapi juga opini publik Muslim global (Fatayillah Mursyidi, 2020).

Contoh nyata dari potensi ini bisa dilihat dari respons global terhadap fatwa-fatwa MUI terkait isu Palestina. Pernyataan resmi MUI tentang konflik Gaza, misalnya, mendapatkan perhatian media internasional dan menjadi salah satu referensi bagi komunitas Muslim di berbagai negara dalam memahami posisi Islam terhadap konflik tersebut (Fajri & Rosyadi, 2024). Namun, dampak dari pernyataan-pernyataan ini masih terbatas karena tidak didukung oleh strategi komunikasi yang terencana dan berkelanjutan.

Dimensi kedua adalah MUI sebagai pembangun konsensus di antara berbagai arus pemikiran Islam. Salah satu tantangan terbesar dalam wacana Islam tentang konflik adalah keberagaman perspektif—dari yang sangat mendukung penggunaan kekerasan atas nama jihad hingga yang menekankan prioritas absolut perdamaian. MUI, dengan otoritas dan inklusivitasnya, memiliki kapasitas untuk membangun konsensus di antara berbagai arus ini dan merumuskan posisi yang dapat diterima oleh spektrum Islam yang luas (Hamid & Muhammad Iqbal Fajri, 2024).

Dimensi ketiga adalah MUI sebagai mitra koalisi dalam gerakan perdamaian lintas agama. Perdamaian yang berkelanjutan memerlukan keterlibatan berbagai komunitas agama secara bersama-sama. MUI memiliki pengalaman dalam dialog lintas agama di tingkat domestik melalui forum-forum seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Pengalaman ini perlu direplikasi dan ditingkatkan ke level internasional melalui kemitraan strategis dengan lembaga-lembaga agama dari tradisi lain (Hanan et al., 2024).

Strategi Komunikasi Dakwah MUI dalam Meredam Sentimen Anti-Perang

1. Transformasi Narasi: Dari Reaktif ke Proaktif

Salah satu pergeseran paradigmatik terpenting yang perlu dilakukan MUI adalah beralih dari komunikasi yang bersifat reaktif menuju komunikasi yang

proaktif dan terencana. Selama ini, MUI cenderung mengeluarkan pernyataan atau fatwa terkait isu global hanya ketika situasinya sudah sangat kritis atau mendapat tekanan dari publik. Pendekatan reaktif semacam ini memiliki beberapa kelemahan fundamental: pertama, ia menempatkan MUI dalam posisi defensif yang kurang menguntungkan secara komunikatif; kedua, pesan yang disampaikan secara reaktif sering kali tidak terstruktur dengan baik dan mudah dilupakan; ketiga, komunikasi reaktif kehilangan kesempatan untuk membentuk agenda—justru agenda itu dibentuk oleh pihak lain (Dyah Fitriyah et al., 2022).

Strategi proaktif yang diusulkan mencakup pengembangan kalender komunikasi tahunan yang mengintegrasikan tema-tema perdamaian dengan momen-momen keagamaan yang sudah ada. Momentum seperti Hari Perdamaian Internasional (21 September), peringatan Holocaust, atau hari-hari besar Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan perdamaian yang terintegrasi secara cerdas. Penelitian menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan dalam konteks momen yang bermakna secara emosional memiliki tingkat penerimaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan pesan yang disampaikan secara *ad hoc* (Arafat, 2025).

2. Transformasi Medium: Memaksimalkan Platform Digital

Ekosistem komunikasi global telah mengalami transformasi yang fundamental dengan dominasi platform digital. Hampir 73% pengguna internet Muslim Indonesia aktif di media sosial, dan mereka menghabiskan rata-rata 3,5 jam per hari di platform-platform tersebut (APJII, 2023). Angka ini merepresentasikan peluang komunikasi yang luar biasa yang belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh MUI.

Optimalisasi platform digital MUI untuk agenda perdamaian memerlukan lebih dari sekadar peningkatan frekuensi *posting*. Ia memerlukan perancangan konten yang secara khusus dirancang untuk konsumsi digital—konten yang visual, mudah dibagikan, dan mampu memicu percakapan positif. Dalam bahasa komunikasi digital, ini berarti MUI perlu mengembangkan kapasitas dalam produksi konten multi-format: infografis, video pendek, podcast, dan konten interaktif yang mengangkat tema perdamaian dari perspektif Islam (Islam et al., 2023).

Yang lebih penting lagi adalah pengembangan strategi konten yang memahami dinamika algoritma platform. Konten yang mendapatkan *engagement* tinggi—dalam bentuk komentar, berbagi, dan respons—akan mendapatkan jangkauan organik yang lebih luas. Oleh karena itu, pesan perdamaian MUI harus dirancang bukan hanya untuk disampaikan, tetapi untuk memancing percakapan bermakna yang memperluas jangkauannya secara eksponensial (Aswati et al., 2024).

3. Penguatan Jaringan Internasional

Komunikasi dakwah perdamaian MUI tidak akan mencapai dampak global yang signifikan jika dilakukan secara isolasi. Efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas jaringan internasional yang dimiliki MUI. Dalam literatur hubungan internasional, jaringan semacam ini dikenal sebagai "*transnational advocacy*

networks"—jaringan aktor-aktor lintas batas yang berbagi nilai dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama (Mahmoud et al., 2024).

MUI memiliki modal awal yang cukup kuat untuk membangun jaringan semacam ini. Keanggotaannya dalam Rabithah Alam Islami, hubungannya dengan OKI, serta koneksi dengan berbagai lembaga Islam di Asia Tenggara seperti MUIS (Singapura), JAKIM (Malaysia), dan berbagai organisasi Islam di Thailand dan Filipina menyediakan fondasi yang dapat dikembangkan. Yang diperlukan adalah transformasi dari hubungan yang selama ini lebih bersifat seremonial menjadi kemitraan substantif dengan agenda bersama yang jelas dan mekanisme koordinasi yang efektif (Abdul Rahman Puteh & Kamil, 2024).

Selain itu, MUI perlu mengembangkan kemitraan lintas-agama di level internasional. Gerakan perdamaian yang paling berhasil dalam sejarah modern—dari gerakan hak sipil Amerika hingga proses perdamaian di Afrika Selatan—melibatkan koalisi agama yang luas. MUI yang bersuara tentang perdamaian bersama dengan Vatikan, World Council of Churches, dan berbagai lembaga keagamaan lainnya akan memiliki dampak yang jauh lebih besar dibandingkan MUI yang bersuara sendirian (Kazanskaia, 2025).

4. Pemberdayaan Ulama Lokal sebagai Agensi Perdamaian

Teori transformasi konflik menekankan pentingnya apa yang disebut sebagai "*middle-range leaders*"—para pemimpin di tingkat menengah yang memiliki koneksi ke atas (ke elite) dan ke bawah (ke masyarakat akar rumput) (Bolton, 2025). Dalam konteks dakwah perdamaian MUI, ulama-ulama lokal yang tersebar di seluruh Indonesia berperan persis sebagai *middle-range leaders* ini.

Oleh karena itu, strategi komunikasi dakwah perdamaian MUI harus memiliki komponen pemberdayaan ulama lokal yang kuat. Ini mencakup penyediaan materi dakwah perdamaian yang berkualitas—khutbah Jumat, materi pengajian, panduan ceramah—yang dapat digunakan oleh ulama-ulama di daerah, pelatihan komunikasi perdamaian bagi para da'i, serta pembentukan jaringan ulama perdamaian yang terhubung dengan MUI pusat. Dengan pendekatan multiplex semacam ini, pesan perdamaian MUI tidak hanya mengalir dari atas ke bawah, tetapi juga diinternalisasi dan dikembangkan secara organik di tingkat komunitas.

Tantangan dan Hambatan dalam Komunikasi Dakwah Global

1. Tantangan Struktural dan Kelembagaan

Efektivitas komunikasi dakwah MUI dalam isu global menghadapi berbagai hambatan struktural yang tidak bisa diabaikan. Pertama, ada ketegangan inherent antara karakter MUI sebagai lembaga nasional dan ambisinya untuk bermain di panggung global. Sebagai institusi yang bersandar pada otoritas nasional—legitimasinya bersumber dari pengakuan pemerintah Indonesia dan penerimaan umat Islam Indonesia—MUI menghadapi keterbatasan dalam proyeksi pengaruh internasionalnya (U. Hasanah & Tawang, 2022).

Kedua, keterbatasan sumber daya—baik finansial maupun kapasitas sumber daya manusia—menjadi hambatan konkret. Pengembangan strategi komunikasi global yang efektif memerlukan investasi yang signifikan dalam

infrastruktur komunikasi, tenaga profesional di bidang media dan hubungan internasional, serta kemampuan produksi konten berkualitas dalam berbagai bahasa. Saat ini, kapasitas MUI dalam dimensi-dimensi ini masih jauh dari memadai dibandingkan dengan lembaga-lembaga Islam global lainnya seperti Al-Azhar atau OKI yang memiliki dukungan negara yang lebih substansial (Efendi et al., 2024).

2. Tantangan Kontekstual dan Konten

Selain hambatan struktural, MUI juga menghadapi tantangan kontekstual yang cukup serius. Dalam masyarakat yang pluralistik dan terpolarisasi, komunikasi tentang perdamaian sering kali menghadapi resistensi dari kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Di dalam komunitas Muslim sendiri, ada kelompok-kelompok yang memandang keterlibatan dalam konflik tertentu sebagai kewajiban agama, bukan sebagai pilihan yang bisa dinegosiasikan. Mengkomunikasikan pesan perdamaian kepada kelompok-kelompok ini tanpa terlihat melegitimasi ketidakadilan adalah tantangan yang sangat kompleks (Sahfutra, 2022).

Tantangan konten yang tidak kalah serius adalah risiko bahwa pesan perdamaian diinterpretasikan sebagai sikap pasif atau bahkan kompromis terhadap ketidakadilan. Dalam konteks konflik Palestina, misalnya, MUI harus mampu memisahkan antara dukungan terhadap perdamaian (yang berarti penentangan terhadap kekerasan dari semua pihak) dengan dukungan terhadap keadilan (yang berarti penentangan terhadap penjajahan dan diskriminasi). Kegagalan untuk membuat distingsi ini secara jelas akan membuat pesan perdamaian MUI kehilangan kredibilitas di mata audiens yang paling peduli (Muzaffar, 2025).

3. Tantangan Ekosistem Informasi

Era *post-truth* yang ditandai oleh merebaknya disinformasi dan misinformasi menciptakan tantangan ekosistem informasi yang serius bagi komunikasi dakwah perdamaian. Ketika platform media sosial dipenuhi oleh konten yang memperuncing sentimen kebencian dan konflik, pesan perdamaian yang bernuansa dan memerlukan refleksi mendalam sering kali kalah bersaing dalam memperebutkan perhatian publik (Zaky & Dilawati, 2024).

Lebih jauh lagi, narasi-narasi konflik yang tersebar di media sosial sering kali memanfaatkan referensi keagamaan—termasuk ayat-ayat Al-Quran dan hadits—yang dikutip secara selektif untuk mendukung agenda kekerasan. Ini menempatkan MUI dalam posisi yang memerlukan tidak hanya komunikasi pesan perdamaian, tetapi juga *counter-messaging* terhadap penyalahgunaan teks-teks keagamaan. Tugas ganda ini memerlukan kapasitas yang jauh lebih besar daripada sekadar komunikasi searah (Rahman et al., 2023).

4. Tantangan Kredibilitas dan Konsistensi

Efektivitas komunikasi dakwah perdamaian juga sangat bergantung pada kredibilitas komunikatornya. Kredibilitas ini dibangun dari dua komponen utama: kompetensi (dianggap memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan) dan karakter (dianggap jujur dan memiliki integritas). Dalam beberapa tahun terakhir, MUI menghadapi tantangan kredibilitas tertentu yang perlu diatasi secara serius

sebelum komunikasi perdamaianya bisa mencapai dampak yang maksimal (Aliyudin & Rustandi, 2023).

Konsistensi sikap adalah salah satu komponen kredibilitas yang paling kritis. Jika MUI menyerukan perdamaian dalam satu konflik tetapi berdiam diri atau bahkan mendukung kekerasan dalam konflik lain, audiens—terutama audiens yang kritis dan terdidik—akan dengan cepat menangkap inkonsistensi ini dan mereduksi kepercayaan mereka terhadap MUI sebagai aktor perdamaian yang tulus. Oleh karena itu, MUI perlu mengembangkan prinsip-prinsip konsisten dalam merespons konflik bersenjata di manapun, yang bersumber dari nilai-nilai universal Islam dan bukan dari pertimbangan geopolitik semata (Harahap et al., 2025).

Rekomendasi Strategis: Peta Jalan Komunikasi Dakwah Perdamaian MUI

Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini merumuskan lima rekomendasi strategis yang dapat menjadi peta jalan bagi MUI dalam mengoptimalkan komunikasi dakwahnya sebagai mediator perdamaian global.

Pertama, pembentukan Divisi Komunikasi Perdamaian Global di bawah struktur MUI yang bertanggung jawab khusus untuk mengembangkan, mengkoordinasikan, dan mengeksekusi strategi komunikasi perdamaian. Divisi ini perlu didukung oleh tenaga ahli dari berbagai disiplin—komunikasi, hubungan internasional, studi Islam, dan teknologi informasi—yang bekerja secara terpadu.

Kedua, pengembangan *Peace Narrative Toolkit*—sebuah kompendium narasi, *framing*, dan argumentasi berbasis nilai-nilai Islam yang dapat digunakan oleh berbagai pihak dalam komunikasi perdamaian, dari ulama lokal hingga diplomat dan aktivis. *Toolkit* ini perlu tersedia dalam berbagai bahasa—setidaknya Indonesia, Arab, Inggris, dan bahasa-bahasa Muslim lainnya seperti Urdu, Melayu, dan Turki (Hisan & Triyoko, 2025).

Ketiga, pembentukan MUI Peace Messenger Network—jaringan formal ulama, da'i, dan cendekiawan Muslim yang terlatih dalam komunikasi perdamaian dan berkomitmen untuk secara konsisten mengintegrasikan pesan perdamaian dalam aktivitas dakwah mereka. Jaringan ini dapat berfungsi sebagai *multiplier* efek yang memperluas jangkauan komunikasi perdamaian MUI secara eksponensial.

Keempat, pengembangan kemitraan strategis dengan lembaga-lembaga riset dan komunikasi perdamaian, baik di dalam maupun luar negeri. Kemitraan dengan lembaga seperti United States Institute of Peace (USIP), Kroc Institute for International Peace Studies, atau Religions for Peace akan memperkuat kapasitas MUI sekaligus meningkatkan kredibilitasnya di mata komunitas internasional (Seha, S., Kurniati, K., & Gassing, Q., 2025).

Kelima, dan yang paling mendasar, adalah komitmen institusional yang *genuine* dan konsisten terhadap prinsip-prinsip perdamaian. Tidak ada strategi komunikasi yang bisa menggantikan autentisitas—dan autentisitas hanya bisa dibuktikan melalui konsistensi tindakan sepanjang waktu. MUI perlu memastikan bahwa seruannya untuk perdamaian tercermin dalam seluruh aspek aktivitas kelembagaannya, bukan hanya dalam pernyataan publik yang sesekali.

KESIMPULAN

Kajian ini telah menunjukkan bahwa optimalisasi komunikasi dakwah MUI sebagai mediator sentimen anti-perang dan perdamaian dunia bukan sekadar kemungkinan teoritis—ia adalah sebuah kebutuhan mendesak yang memiliki landasan yang kuat, baik dari perspektif Islam maupun dari perspektif teori komunikasi dan resolusi konflik kontemporer. MUI memiliki modal yang sangat berharga: otoritas moral, jaringan internasional, basis konstituen yang besar, dan tradisi keilmuan Islam yang kaya. Yang diperlukan adalah transformasi sistematis dalam cara MUI menggunakan modal ini untuk agenda perdamaian global.

Secara lebih spesifik, penelitian ini telah mengidentifikasi empat temuan utama. Pertama, ada kesesuaian yang mendalam antara nilai-nilai inti Islam dan prinsip-prinsip resolusi konflik modern, yang memberikan landasan yang kuat bagi komunikasi dakwah perdamaian. Kedua, MUI memiliki potensi besar sebagai aktor diplomasi moral, pembangun konsensus, dan mitra koalisi perdamaian lintas agama di tingkat global. Ketiga, efektivitas komunikasi perdamaian MUI memerlukan transformasi dari pendekatan reaktif ke proaktif, dari medium konvensional ke digital, dari isolasi ke jaringan, dan dari *top-down* ke *multiplex*. Keempat, berbagai tantangan struktural, kontekstual, dan ekosistem informasi perlu diatasi secara sistematis melalui investasi kelembagaan yang serius.

Dari sisi saran akademis, penelitian ini perlu dilanjutkan dengan kajian empiris yang lebih mendalam—termasuk studi kasus tentang kampanye komunikasi perdamaian yang sudah dilakukan MUI, wawancara mendalam dengan para pejabat dan pemangku kepentingan, serta riset audiens yang mengukur efektivitas pesan perdamaian MUI di berbagai segmen masyarakat. Penelitian komparatif dengan lembaga-lembaga Islam di negara lain juga akan memberikan perspektif yang sangat berharga.

Dari sisi saran kebijakan, MUI perlu segera mengambil langkah-langkah konkret untuk membangun kapasitas komunikasi perdamaian globalnya. Ini mencakup reformasi struktural internal, investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi komunikasi, serta komitmen politik yang jelas dari kepemimpinan MUI untuk menjadikan perdamaian global sebagai salah satu prioritas utama agenda kelembagaan. Pemerintah Indonesia juga memiliki peran penting dalam mendukung peran diplomatik moral MUI—tidak hanya melalui dukungan finansial, tetapi juga dengan memberikan ruang dan legitimasi bagi MUI untuk memainkan peran yang lebih aktif dan independen dalam diplomasi perdamaian.

Pada akhirnya, pertarungan yang sesungguhnya bukan hanya tentang reputasi MUI atau posisi Indonesia di panggung global—ia tentang apakah Islam di Indonesia bisa menjadi kekuatan nyata bagi perdamaian di dunia yang semakin terpecah. Tantangan ini cukup besar untuk memerlukan respons yang serius, terencana, dan berkelanjutan. Dan MUI, dengan semua potensi dan keterbatasannya, adalah salah satu aktor yang paling strategis untuk memimpin respons tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Puteh, A. C., & Kamil, A. I. (2024). Islamist Networks in Southeast

- Asia. *Aceh Anthropological Journal*, 8(1), 119.
<https://doi.org/10.29103/aaj.v8i1.15968>.
- Ahsan, S. (2022). Role of religion in peacebuilding and conflict resolution: case study of Islam. *Reality of Politics*, 2022(No. 22(4)), 7–27.
<https://doi.org/10.15804/rop2022401>.
- Aliyudin, M., & Rustandi, R. (2023). *Communicator_Credibility_in_Validating_Information*.
- APJII. (2023). *Laporan Survei Pengguna Internet Indonesia 2022–2023*. APJII.
<https://apjii.or.id/survei>.
- Arafat, M. (2025). *DIPLOMASI ILMIAH DAN KONSENSUS KEAGAMAAN: STUDI ADMINISTRASI PUBLIK KONGRES KALENDER HIJRIAH INTERNASIONAL ISTANBUL* 2016.
<https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernology>.
- Aswati, F., Rezky Kamal, F., & Siti Ainun, R. (2024). Menyebarkan Pesan Harmoni Strategi Konten dan Pemasaran yang Teruji di Era Media Sosial. *Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies*, 3(1), 43–50.
<https://doi.org/10.59029/int.v3i1.32>.
- Bolton, D. (2025). From conflict management to conflict transformation: Progress in Northern Ireland since 2017. In *Conflict, peace and mental health*. Manchester University Press. <https://doi.org/10.7765/9781526190505.00020>.
- Buehler, M. (2021). *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/9781316711071>.
- Dyah Fitriyah, R., Huda, S., Mujib Adnan, A., Hermansah, T., & Hidayatul Ummah, A. (2022). *Reformulation of Da'wah Communication Paradigm in the Post-Pandemic Era*.
- Efendi, E., Nasution, H. I., & As-Singkily, H. (2024). Manajemen Media Dakwah pada Era Globalisasi serta Tantangannya. *VISA: Journal of Visions and Ideas*, 4(1), 14.
- Fajri, I., & Rosyadi, A. R. (2024). ATTITUDE OF INDONESIAN MUSLIMS TOWARDS PRODUCT BOYCOTT PRO-ISRAEL Analysis Of Fatwas Indonesian Ulema Council (MUI) Number 83 of 2023 Concerning Legal Status of Supporting the Palestinian Struggle. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 26(1), 47–61. <https://doi.org/10.24815/kanun.v26i1.36794>.
- Fatayillah Mursyidi, A. (2020). ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial MUI and Its Fatwas: The Articulation of Modern Authority in A Religious Democracy of Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1).
<https://doi.org/10.19105/ejpis>.
- Hamid, I. R., & Muhammad Iqbal Fajri, A. S. (2024). The Contributions of Nahdlatul Ulama to World Peace: A Taxonomy Literature Review. *Dialektika: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 9(1), 25–35.
<https://doi.org/10.36636/dialektika.v9i1.3981>.
- Hanan, D., Ridwan, R., Azaria, S., & Suci, P. (2024). Bridging Peace and Interfaith Dialogue through Religion Twenty (R20) Forum in Indonesia 2022. *Religió*

- Jurnal Studi Agama-Agama*, 14(1), 1–21.
<https://doi.org/10.15642/religio.v14i1.2579>.
- Harahap, J. Z., Nasution, H., & Azhar, A. A. (2025). Antara Moralitas dan Realitas Politik: Sikap Komunikasi Islam Indonesia terhadap Krisis Palestina. *Islam & Contemporary Issues*, 5(1), 36–44. <https://doi.org/10.57251/ici.v5i1.1671>.
- Hasanah, R. (2024). INCREASING PERSUASION: ISLAMIC BOARDING SCHOOL PUBLIC RELATIONS THROUGH THE LIKELIHOOD ELABORATION MODEL. *Managere: Indonesian Journal of Educational Management*, 6(1), 125–139. <https://doi.org/10.52627/managere.v6i1.426>.
- Hasanah, U., & Tawang, N. A. (2022). Da'wah Policy Controversy: A Case Study of Discourse on Standardization and Certification of Da'i in Indonesia. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 16(1), 135–154. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v16i1.16531>.
- Hasyim, S. (2020). Fatwas and Democracy: Majelis Ulama Indonesia (MUI, Indonesian Ulema Council) and Rising Conservatism in Indonesian Islam. *TRaNS: Trans -Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 8(1), 21–35. <https://doi.org/DOI:10.1017/trn.2019.13>.
- Hifni, A., Fahdiah, S., Infitah, N., & Fihrisi, F. (2022). *Islam Indonesia: The Orientation of Islamic Studies and Contribution to Global Civilization*.
- Hisan, L. C., & Triyoko, H. (2025). The Strategic Role of Indonesian Ulama in the Global Dissemination of Islamic Values through Islamic English. *Journal of Language and Literature Studies*, 5(3), 842–850. <https://doi.org/10.36312/jolls.v5i3.3018>.
- Islam, J. P., Yunus Mustofa, M., Taufiq, F., & Tsauro, A. (2023). EDUKASIA ISLAMIKA Promoting Religious Moderation in New Media: Between Contestation and Claiming Religious Authority. 8(1). <https://doi.org/10.28918/jei.v8i1.7326>
- Kazanskaia, A. N. (2025). Case Studies of Successful Interfaith Initiatives: Lessons for Practice and Policy. *NEYA Global Journal of Non-Profit Studies*. <https://doi.org/10.64357/neya-gjnps-int-fr-dg-10>
- Kholili, H. M. (2023). *Reconceptualization of the Da'wah Movement in Indonesia: Perspectives on Da'wah Communication*. <https://doi.org/https://doi.org/10.58631/injury.v2i3.40>
- Mahmoud, O. N., Alsaied, M. A., & Maabdeh, M. N. (2024). Cultural communication with others and its impact on promoting the values of world peace. *Journal of Infrastructure Policy and Development*, 8(15), 10458. <https://doi.org/10.24294/jipd10458>
- Malaviya, R. (2023). *International Journal of Social Science and Human Research Peace, Conflict and the Resurgence of Religion in World Politics*. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i12-107>
- Meyer, D. S. (2013). Antiwar and Peace Movements. In *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9780470674871.wbespm245>
- Muzaffar, C. (2025). Muslim Asia and the Quest for Peace. In *Can Asians Think of Peace?: Essays on Managing Conflict in the Asian Century* (pp. 43–45). Springer Science+Business Media. https://doi.org/10.1007/978-981-96-5666-0_10

- Puri, C. N., & Yumitro, G. (2022). Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Penguatan Diplomasi Islam. *Sospol*, 8(1), 96–108. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i1.19717>
- Rahman, Muh. F., Irsyadi, M. M., Ferdiansyah, H., Suma, M. A., & Trinanda, D. (2023). STRATEGIC EFFORTS OF BINCANGSYARIAH.COM AND ISLAMI.CO EDITORIALS IN SPREADING COUNTER-NARRATIVE EXTREMISM ON THE INTERNET. *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 8(2), 249–282. <https://doi.org/10.22515/albalagh.v8i2.7582>
- Regus, M. (2022). Islam and the Making of a Non-Violent and Peaceful Public Sphere in Indonesia. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 18(2). <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v18i2.14580>
- Sahfutra, S. A. (2022). Reposisi Mui Di Indonesia: Menyoal Fatwa Sesat Sebagai Sublimasi Konflik Dan Kekerasan. In *Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN* (Vol. 6, Number 1).
- Supriyono, S. (2024). RESEARCH METHODOLOGY: QUALITATIVE APPROACH. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26723.57121>
- Wani, N. U. I. (2024). Peace and Conflict Resolution in Islam: A Perspective Building. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies*. <https://doi.org/10.20885/ijiis.vol6.iss2.art2>
- Zaky, M., & Dilawati, R. (2024). Realizing Peace in the Digital World. *Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies*, 3(1), 21–30. <https://doi.org/10.59029/int.v3i1.26>